

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

Jl. K.H. Samanhudi, Kompleks Perkantoran Cangakan
Telp/Fax. (0271) 495176/494246 Karanganyar 57712
Email: inspektorat_kra@yahoo.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap peran pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan. Kemajuan teknologi, informasi dan kedewasaan masyarakat di era saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai modal pencapaian peran pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan bersih (*clean goverment*) di Kabupaten Karanganyar, perlu ditopang dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Manajemen pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dari siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena suatu proses maka kegiatan yang dilakukan tidak ada akhirnya, secara berkesinambungan proses tersebut harus mengarah kepada semakin dekatnya pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan mempunyai peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil-hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar berperan sebagai umpan balik dalam penyusunan perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan agar tujuan dapat dicapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah berfungsi memberikan jasa kegiatan yang bersifat *early warning system* (peringatan dini), konsultasi, dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan berjalannya peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar, perlu didukung jalinan komunikasi dengan baik antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan OPD lain di Kabupaten Karanganyar, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Karanganyar, melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
4. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
5. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2021.

Tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk :

1. Memberikan informasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemeritah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Visi Inspektorat Kabupaten Karanganyar **“Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Tangguh”**.

Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu mengacu pada Visi tersebut maka disusunlah Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pengawasan yang Berkualitas, Handal dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tercapainya Pemerintahan yang Baik;
3. Melaksanakan Koordinasi dan atau Konsultasi Pengawasan Menuju Pengawasan yang Lebih Sinergis;
4. Melaksanakan Pemantauan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pengawasan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Prioritas kegiatannya antara lain :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Pendampingan dan AsistensiTindak lanjut hasil temuan pengawasan

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. *STANDARD OPERATING PROSCEDURE (SOP)* INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan SOP guna mencapai tujuan tugas dengan efektif dan efisien. SOP tersebut ditetapkan dalam Keputusan Inspektorat Kabupaten Karanganyar No. 900/35/2013 Tentang SOP dan Prosedur Pemeriksaan yang terdiri dari SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, SOP Inspektorat Pemeriksaan Khusus, SOP Pemeriksaan Reguler, SOP Inspektorat Pemeriksaan Tujuan Tertentu, dan SOP Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.

D. PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/500 Tahun 2018 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2021.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor Adapun Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

D. KEPEGAWAIAN

Tabel 2.1 DAFTAR PEGAWAI INSPEKTORAT

NO	NAMA	NIP	Status	PANGKAT/GOL
1	NUGROHO, S.Sos., M.Hum.	19680705 199001 1 001	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
2	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H ,MM	19680604 199503 2 003	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
3	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	19700205 199101 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
4	HENI KUSTYAWATI, S.H, MM	19680520 199403 2 009	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
5	RETNO RINAWATI, S.H, MM	19680131 199603 2 003	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
6	TRI WULAN AJI, S. Sos, MM	19660503 199803 2 003	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
7	Dra. SUNARMI, MM	19660316 199803 2 005	PNS	Pembina (IV/a)
8	BUDI RAHARJO, S.Sos	19601126 198303 1 016	PNS	Pembina (IV/a)
9	Ir. SUHUD, MM	19601001 199802 1 001	PNS	Pembina (IV/a)
10	RAHDRIAWATI, S.IP	19670320 198901 2 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
11	HARTUTI, S.E	19661224 199303 2 007	PNS	Pembina (IV/a)
13	ENDANG SRI SUHARTI, S.E	19660416 199803 2 001	PNS	Pembina (IV/a)
14	ENDANG SRI SUSILANINGSIH, S.E	19621110 198503 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
15	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, ST, MM	19740624 200312 1 004	PNS	Pembina (IV/a)
16	RATNA FATMAWATI, SE,M.Si, Ak	19791015 200804 2 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
17	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos	19650430 198603 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
18	MULYATI, SE, M.Acc	19740810 199903 2 006	PNS	Pembina (IV/a)
19	BASRI SETYOWATI, S.Sos	19680521 199312 2 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
20	AHMAD CHOIRUDIN, S.H	19760822 200604 1 004	PNS	Penata (III/c)
21	C. ANDI MURTOPO, S.Sos	19781217 199803 1 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
22	FAJAR AMIEN, ST, M.Si	19790123 200801 1 008	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
23	INNAHA RAHMAWATI, SE, M.Si	19771211 200902 2 001	PNS	Penata (III/c)
24	MUHAMAT YUSUP, SE, M.Si	19830807 200902 1 003	PNS	Penata (III/c)
25	CICUK DWI HANDOKO, SE, M. Si	19830524 200902 1 004	PNS	Penata (III/c)

26	WAHYUNINGSIH , SH	19760710 201001 2 022	PNS	Penata (III/c)
27	AGUNG BUDIYARTO, SH	19770101 201001 1 023	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
28	PRIYANTO HARTO NUGROHO, SE	19780118 201001 1 010	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
29	SHINTA KUSUMA DEWI, SH	19841030 201001 2 027	PNS	Penata (III/c)
30	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, SH	19851021 201001 1 011	PNS	Penata Muda Tingka I (III/b)
31	ARTTIKA RAHMA SARI, SE	19841204 201101 2 016	PNS	Penata (III/c)
32	SUPRAYITNO, ST	19770420 201101 1 003	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
33	AGUS HARMANTO, SE, M. Si	19840411 200604 1 004	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
34	RISKHA AMALLIA I, SH, M.Si	19801109 201001 2 013	PNS	Penata (III/c)
35	SURYA AFRIZAL, SH,MM	19830424 201001 1 030	PNS	Penata (III/c)
36	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, SH	19821118 201001 1 022	PNS	Penata (III/c)
37	DEWI SURYANINGSIH, SH	19781208 201001 2 014	PNS	Penata (III/c)
38	RETNO WULANDARI, SH	19860304 201001 2 032	PNS	Penata (III/c)
39	MIYA SUNDARI, SH	19841214 201001 2 026	PNS	Penata (III/c)
40	ATIK RAHMAWATI, SH	19770831 201001 2 011	PNS	Penata (III/c)
41	NANDIKA SARI WIDATA, SH,MH	19870819 201012 2 006	PNS	Penata (III/c)
42	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, SE	19790625 201101 1 004	PNS	Penata Muda (III/a)
43	FAUZY HENDRO PURNOMO, SE	19860610 201101 1 012	PNS	Penata Muda (III/a)
44	JAKA MARYANTO, SH	19731117 200906 1 001	PNS	Penata Muda (III/a)
45	BASMAN	19651222 201001 1 001	PNS	Pengatur (II/c)
46	PURWADI	19771126 201001 1 002	PNS	Pengatur (II/c)
47	SUGIYONO	19730326 200701 1 021	PNS	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
48	BANGKIT DWI NUGROHO, SH	-	Tenaga Kontrak	Pengadministrasi
49	AGUS SUPRAPTO, SE	-	Tenaga Kontrak	Caraka
50	ANGGIT APRILIA PAMUNGKAS	-	Tenaga Kontrak	Pengemudi
51	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	-	Tenaga Kontrak	Penjaga Malam

2.2 DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL INSPEKTORAT YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1.	NUGROHO, S.Sos., M.Hum.	Inspektur Pembantu Wil. I	Memenuhi	Memenuhi
2.	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H ,MM	Inspektur Pembantu Wil II	Memenuhi	Memenuhi
3.	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	Inspektur Pembantu Wil. III	-	-
4.	RATNA FATMAWATI, SE,M.Si, Ak	Kasubbag Adm. dan Umum	Memenuhi	Memenuhi
5.	Dra. SUNARMI, MM	Kasubag Perencanaan	Memenuhi	Memenuhi
6.	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, ST, MM	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Memenuhi	Memenuhi

2.3 DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	HENI KUSTYAWATI, S.H, MM	19680520 199403 2 009	P2UPD Madya
2.	RETNO RINAWATI, S.H, MM	19680131 199603 2 003	Auditor Madya
3.	MULYATI, SE, M.Acc	19740810 199903 2 006	Auditor Madya
4.	TRI WULAN AJI, S. Sos, MM	19660503 199803 2 003	Auditor Kepegawaian Madya
5.	RAHDRIAWATI, S.IP	19670320 198901 2 001	Auditor Kepegawaian Muda
6.	HARTUTI, S.E	19661224 199303 2 007	P2UPD Muda
7.	ENDANG SRI SUHARTI, S.E	19660416 199803 2 001	Auditor Muda
8.	ENDANG SRI SUSILANINGSIH, S.E	19621110 198503 2 011	Auditor Muda
9.	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos	19650430 198603 2 011	Auditor Muda
10.	BASRI SETYOWATI, S.Sos	19680521 199312 2 001	P2UPD Muda
11.	AHMAD CHOIRUDIN, S.H	19760822 200604 1 004	P2UPD Muda
12.	C. ANDI MURTOPO, S.Sos	19781217 199803 1 002	P2UPD Muda
13.	INNAHA RAHMAWATI, SE, M.Si	19771211 200902 2 001	Auditor Pertama
14.	MUHAMAT YUSUP, SE, M.Si	19830807 200902 1 003	Auditor Pertama
15.	WAHYUNINGSIH , SH	19760710 201001 2 022	Auditor Kepegawaian Pertama
16.	AGUNG BUDIYARTO, SH	19770101 201001 1 023	Auditor Pertama
17.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, SE	19780118 201001 1 010	Auditor Pertama
18.	SHINTA KUSUMA DEWI, SH	19841030 201001 2 027	Auditor Pertama
19.	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, SH	19851021 201001 1 011	Auditor Pertama
20.	ARTTIKA RAHMA SARI, SE	19841204 201101 2 016	Auditor Pertama
21.	SUPRAYITNO, ST	19770420 201101 1 003	Auditor Pertama

2.4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	FAJAR AMIEN, ST	19790123 200801 1 008	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	DEWI SURYANINGSIH, SH	19781208 201001 2 014	Calon Auditor
3.	RISKHA AMALIA INDRIAWATI, SH	19801109 201001 2 013	Calon Auditor
4.	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, SH	19821118 201001 1 022	Calon Auditor
5.	SURYA AFRIZAL, SH, MM	19830424 201001 1 030	Calon Auditor
6.	MIYA SUNDARI, SH	19841214 201001 2 026	Calon Auditor
7.	RETNO WULANDARI, SH	19860304 201001 2 032	Calon Auditor
8.	CICUK DWI HANDOKO, SE	19830524 200902 1 004	Calon Auditor
9.	AGUS HARMANTO, SE	19840411 200604 1 004	Calon Auditor
10.	WAHYU WIBOWO,S.STP	19911116 201406 1 002	Pengolah Data LHP dan Pengaduan
11.	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, A.Md	19790625 201101 1 004	Pengadministrasi Keuangan
12.	FAUZY HENDRO PURNOMO, A. Md	19860610 201101 1 012	Pengolah Data LHP dan Pengaduan
13.	JAKA MARYANTO	19731117 200906 1 001	Pengolah Data LHP dan Pengaduan
14.	BASMAN	19651222 201001 1 001	Pramu Kantor
15.	PURWADI	19771126 201001 1 002	Pengemudi
16.	SUGIYONO	19730326 200701 1 021	Satuan Pengamanan Kantor
17.	BANGKIT DWI NUGROHO, SH	-	Pengemudi
18.	AGUS SUPRAPTO, SE	-	Pengadministrasi
19.	ANGGIT APRILIYA PAMUNGKAS	-	Pengemudi
20.	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	-	Tenaga Kontrak

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/ level 1/ level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2,63 level Ket. : Hasil p enilaian dari BPKP
2		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/ level 1/ level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,00 level Ket. : Hasil p enilaian dari BPKP

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN	KB JK . S TRA. A.	PROGR AM	URAIAN KEGIATAN	TARGE T	REAL ISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA M ENGATA SI PERM ASALAHAN
PENGA WASAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 5.102.000,00 Realisasi: Rp. 5.102.000,00 Persentase: (100,00%)	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen CALK	1 Dokumen CALK (100.00%)		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 6.204.253.000,00 Realisasi: Rp. 5.657.310.238,00 Persentase: (91,18%)	Tersedianya Gaji ASN dan Tunjangan ASN 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		
			2) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 15.897.000,00 Realisasi: Rp. 14.524.700,00 Persentase: (91,37%)	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai 48 PAK	48 PAK (100.00%)		
			3) Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen yang telah ter	100% (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 2.672.000,00 Realisasi: Rp. 2.672.000,00 Persentase: (100,00%)	verifikasi 100 %			
				4 Koordinasi dan) Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Sesuai SAP 100 %	100 % (100.00 %)		
				5 Koordinasi dan) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersusunnya Laporan Keuangan Inspektorat Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
				6 Koordinasi dan) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran 14 dokumen	14 dokumen (100.00 %)		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendidikan dan) Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 210.370.000,00 Realisasi: Rp. 198.890.912,00 Persentase: (94,54%)	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan yang kompeten 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan) Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 23.903.400,00 Realisasi: Rp.	Jumlah peralatan rumah tangga dan alat kebersihan 1 Paket, T	1 Paket , 3 Tabung (100.00%)			

				22.918.398,00 Persentase: (95,88%)	erpenuhi nya keb utuhan perlengk apan pe ncegaha n kebak aran 3 Tabung			
				2) Penyediaan) Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 28.001.400,00 Realisasi: Rp. 24.455.400,00 Persentase: (87,34%)	Jumlah logistik kantor 1 Paket, Jumlah Tabung LPG 24 Tabung	1 Paket , 24 T abun g (10 0.00 %)		
				3) Penyediaan) Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 31.945.700,00 Realisasi: Rp. 31.941.600,00 Persentase: (99,99%)	Tersedi anya barang cetakan, tersedia nya jasa pengga ndaan, t ersedian ya jasa penjilida n 1 paket	1 paket (100. 00%)		
				4) Penyediaan) Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang- undangan Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.520.000,00 Persentase: (84,00%)	Jumlah bahan bacaan 24 eks	24 eks (100.0 0%)		
				5) Penyediaan) Bahan/Material Anggaran: Rp. 90.725.000,00 Realisasi: Rp. 88.006.000,00 Persentase: (97,00%)	Tersedi anya ke butuhan alat tulis kantor 1 PAKET	1 PA KET (100.0 0%)		
				6) Fasilitas) Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 86.920.000,00 Realisasi: Rp. 1100 paket,	Jumlah Snack, Makan dan Minum 1100 paket,	110 paket , 60 Paket (55.0 0%)		

				86.525.000,00 Persentase: (99,55%)	Jumlah Snak, Makan dan Minum Jamuan Tamu 60 Paket			
				7 Penyelenggaraan) Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 110.520.000,00 Realisasi: Rp. 110.168.452,00 Persentase: (99,68%)	Tersele nggaran ya koord inasi lintas sektoral bidang p engawa san 12 bulan	12 bulan (100. 00%)		
				8 Penatausahaan) Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 20.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksa nanya p enataus ahaan Arsip 12 bulan, Tenaga THL Arsip 12 Bulan	12 bulan , 12 Bulan (100. 00%)		
			Penga daan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intah Daerah	1 Pengadaan) Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 49.013.500,00 Realisasi: Rp. 47.390.000,00 Persentase: (96,69%)	Tersedi anya Hammer Test 1 Unit, Ter sediany a AC Split 1 Unit	1 Unit, 1 Unit (100. 00%)		
			Penyed iaan Jasa P enunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	1 Penyediaan Jasa) Surat Menyurat Anggaran: Rp. 24.400.000,00 Realisasi: Rp. 23.561.600,00 Persentase: (96,56%)	Terlaksa nanya p engirima n surat/ dokume n/paket 12 bulan	12 bulan (100. 00%)		
				2 Penyediaan Jasa) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 147.930.000,00 Realisasi:	Tersedi anya jasa pel ayanan listrik, air, telpon, dan	12 bulan (100. 00%)		

				Rp. 132.179.882,00 Persentase: (89,35%)	internet 12 bulan			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 163.400.000,00 Realisasi: Rp. 140.590.895,00 Persentase: (86,04%)	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai 11 unit, Terpeliharanya sepeda motor yang siap pakai 13 Unit	11 unit, 13 Unit (100.00%)		
			2	Pemeliharaan) Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 23.530.000,00 Realisasi: Rp. 23.145.000,00 Persentase: (98,36%)	Jumlah peralatan kantor 24 unit	24 unit (100.00%)		
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 110.000.000,00 Realisasi: Rp. 107.375.100,00 Persentase: (97,61%)	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 11.285.000,00 Realisasi: Rp. 10.785.000,00 Persentase: (95,57%)	Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 paket	1 paket (100.00%)		
		Penyelenggaraan	1	Pengawasan Kinerja	Terlaksananya p	16 LHP (		

			aan Pe ngawa san Internal	Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 101.784.800,00 Realisasi: Rp. 94.214.800,00 Persentase: (92,56%)	engawa san kinerja OPD 16 LHP	100.0 0%)		
				2 Pengawasan) Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 236.828.900,00 Realisasi: Rp. 195.333.900,00 Persentase: (82,48%)	Terlaksa nanya p engawa san kinerja OPD 32 LHP	32 LHP (100.0 0%)		
				3 Reviu Laporan) Kinerja Anggaran: Rp. 11.881.000,00 Realisasi: Rp. 10.316.000,00 Persentase: (86,83%)	Terlaksa nanya p engawa san kinerja OPD 25 Evaluasi LAKIP OPD	25 Ev aluasi LAKI P OPD (100. 00%)		
				4 Reviu Laporan) Keuangan Anggaran: Rp. 115.046.000,00 Realisasi: Rp. 106.893.300,00 Persentase: (92,91%)	Terlaksa nanya p engawa san kinerja OPD 48 LHP	48 LHP (100.0 0%)		
				5 Pengawasan) Desa	Data Belum Tersedia			
				6 Kerjasama) Pengawasan Internal	Data Belum Tersedia			
				7 Monitoring dan) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Anggaran: Rp.	Terlaksa nanya m onitoring dan evaluasi tindak lanjut re komend asi pem eriksaan 7 lap	7 lap (100. 00%)		

				309.328.000,00 Realisasi: Rp. 226.241.785,00 Persentase: (73,14%)				
		i	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Penanganan) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Data Belum Tersedia			
				2 Pengawasan) Dengan Tujuan Tertentu	Data Belum Tersedia			
		j	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	1 Perumusan) Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Data Belum Tersedia			
				2 Perumusan) Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Data Belum Tersedia			
			Asistensi dan Pendampingan	1 Pendampingan) dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Data Belum Tersedia			
				2 Pendampingan,) Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Data Belum Tersedia			
				3 Koordinasi,) Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Anggaran: Rp. 90.040.000,00 Realisasi: Rp.	Tersusunnya rencana aksi Korupgah Tahun 2021 100 %	100 % (100.00 %)		

				86.770.000,00 Persentase: (96,37%)				
				4 Pendampingan,) Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Data Belum Tersedia			

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23/2014). Inspektorat Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan merupakan tugas yang dilakukan di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada pasal 6 meliputi:

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah

Inspektorat Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat sebagai Unsur Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Selain tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga mempunyai fungsi sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan asset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Juga meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama Tahun Anggaran 2019 tugas pokok dan fungsi tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup menghambat kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal;

B. SARAN

Peningkatan pelaksanaan program Inspektorat Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik di Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada umumnya;
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

**INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR**

Drs. SUCAHYO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 1962010619890301010